
REKAPITULASI
PELANGGARAN
Yang Dilaporkan oleh Masyarakat
PEMPROV KALTIM
TAHUN 2026
Kaltim Maju Bersama Masyarakat
Suara Masyarakat untuk Kaltim yang Lebih Baik
Bersama Awasi, Bersama Wujudkan Perubahan
LAPORAN
TRANSPARANSI
AKUNTABILITAS
PELAYANAN PUBLIK
PENGAWASAN
KALIMANTAN TIMUR
INTEGRITAS
PELAYANAN
KALIMANTAN TIMUR
PELAPORAN
UNTUK PELAYANAN PUBLIK
YANG LEBIH BAIK

Rekapitulasi Pelanggaran Yang Dilaporkan oleh Masyarakat

No	Pengawasan Internal	Gambaran Umum Aduan	Tahun	Temuan	Rekomendasi	Status Tindaklanjut
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penggunaan Asrama Mahasiswa yang tidak sesuai dengan peruntukkannya	2026	1	1	Selesai
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Proses Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terhambat	2026	1	1	Dalam proses
3	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dugaan Pungli Sekolah	2026	1	1	Selesai
4	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Benturan Kepentingan & Pungli Kegiatan Studi Tiru SLBN Tenggarong	2026	1	1	Selesai
5	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dugaan Manipulasi Data Biaya Pendidikan (BKP) dan Praktik Administrasi Tidak Transparan	2026	1	1	Selesai
6	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dugaan Kecurangan SPMB SMAN	2026	1	1	Selesai
7	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Keterlambatan Pembayaran TPP 13 dan Kejelasan TPP Juni-Desember 2026	2026	1	1	Selesai
8	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Server pengisian MONEV Beasiswa Kaltim Tuntas Error	2026	1	1	Selesai
9	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Legalitas Badan Usaha pada Pembangunan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Bandara Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu	2026	1	1	Dalam proses
10	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Arogansi Pimpinan	2026	1	1	Selesai
11	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dugaan Markup Harga dan Ketidakjelasan Legalitas Penyedia pada Pengadaan Perlengkapan	2026	1	1	Selesai

Inspektur,

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
Pembina Utama Madya / (IV/d)
NIP. 197408181997031006

#10258567 - Cetak Laporan 2026-07-30 09:02:57

Umardin Website Ditindaklanjuti oleh Instansi 9 jam yang lalu

Terdisposisi : **Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Legalitas Badan Usaha PT.Awal

Berdasarkan peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta peraturan lkpp nomor 6 tahun 2022 tentang sistem pengaduan pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa masyarakat menyampaikan pengaduan kepada apip (aparat pengawasan intern pemerintah) disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

berdasarkan data layanan pengadaan secara elektronik (lpse) : https://spse.inaproc.id/kaltimprov/evaluasi/10061220000/pemenangberkontrak, bahwa pt. awal yang beralamat jalan jakarta blok cv. no. 7 rt.071 - samarinda (kota) - kalimantan timur merupakan pemenang tender/pemenang berkontrak pembangunan prasarana dan pendukung fasilitas bandara ujoh bilang kabupaten mahakam ulu tahun anggaran apbd 2025 dengan harga kontrak rp. 42.187.305.636,54 atau buangan 2,7 % dari nilai hps rp. 43.366.060.683,01 melalui satuan kerja dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat provinsi kalimantan timur.

bahwa syarat kualifikasi usaha untuk mengikuti tender pembangunan prasarana dan pendukung fasilitas bandara ujoh bilang kabupaten mahakam ulu adalah memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi usaha menengah, serta disyaratkan subklasifikasi konstruksi gedung lainnya bg009 kbli 2020 41019 dan subklasifikasi penyiapan lahan konstruksi pl003 kbli 2020 43120.
sementara pt. awal yang beralamat jalan jakarta blok cv. no. 7 rt.071 - samarinda (kota) - kalimantan timur, patut di pertanyakan terkait legalitas badan usaha, khususnya kepemilikan sertifikat badan usaha (sbu) bg009 dan pl003, mengingat sbu yang dimaksud, tidak ditemukan pada website lpjk : https:///lpjk.pu.go.id/pencarian-bu-index.

sehubungan dengan itu, kami meminta kepada inspektorat kalimantan timur selaku apip untuk dapat menindaklanjuti, dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

SENIN, 2025/08/25 | SP4N-LAPOR!



#10258567 **Tindak Lanjut10** Komentar 1

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 9 Jun, 03:16
Laporan didisposisikan ke **Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur** oleh **Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**

Umardin 9 Jun, 15:34

Terima kasih, kami tunggu hasil tindak lanjutnya.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 9 Jun, 23:16

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

Umardin 10 Jun, 12:56

Kami tunggu hasil tindak lanjutnya.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 11 Jun, 00:57

Laporan anda telah disampaikan pada unit Inspektur Pembantu (Irban) Bidang Perekonomian, selanjutnya akan dilakukan penelaahan dan pemeriksaan atas laporan anda.
Terima kasih.

Umardin 11 Jun, 12:53

Terima kasih, kami tunggu hasil tindak lanjutnya.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 15 Jul, 03:04

Yth. Pelapor,

Laporan anda telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Unit terkait.
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa,

1. PT. Arkamaya Wangsa Ali - PT. Kiesha Anugrah Prima KSO ditetapkan sebagai pemenangberkontrak pada Pembangunan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Bandara Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu
2. PT. AWAL memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) subklasifikasi BG009 kualifikasi Menengah dengan PB-UMKU Nomor : 912030230084900010001 yang ditetapkan pada 25 April 2025 berlaku s.d. 24 April 2028
3. PT. AWAL memiliki SBU subklasifikasi PL003 kualifikasi Spesialis dengan PB-UMKU Nomor : 912030230084900090003 ditetapkan pada 6 September 2022 berlaku s.d. 5 September 2025 (masih aktif hingga proses pemilihan dan penetapan pemenang dilaksanakan).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Arkamaya Wangsa Ali pada saat pelaksanaan pemilihan hingga dinyatakan sebagai pemenang memiliki SBU BG009/Konstruksi Gedung Lainnya Kualifikasi Menengah dan PL003/Penyiapan Lahan Konstruksi sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pemilihan.

Terima kasih.

Umardin 15 Jul, 16:04

Yth. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan hasil pemantauan publik pada aplikasi LPSE Provinsi Kalimantan Timur, Pokja Pemilihan telah mengumumkan pemenang tender untuk paket pekerjaan di atas atas nama PT. AWAL. Namun, ditemukan ketidaksesuaian material yang sangat fatal pada dokumen kualifikasi penyedia tersebut. Berdasarkan data Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sah dan terdaftar pada LPJK, nama badan usaha yang tercantum adalah PT. Arkamaya Wangsa Ali (Bukti SBU Terlampir), bukan PT. AWAL.

Menyatakan KEBERATAN atas jawaban yang diberikan oleh Inspektorat Daerah. Jawaban tersebut menyatakan bahwa PT. Arkamaya Wangsa Ali memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) subklasifikasi BG009 kualifikasi Menengah dengan PB-UMKU Nomor : 9120[redacted] yang ditetapkan pada 25 April 2025 berlaku s.d. 24 April 2028, dan memiliki SBU subklasifikasi PL003 kualifikasi Spesialis dengan PB-UMKU Nomor : 912[redacted] ditetapkan pada 6
September 2022 berlaku s.d. 5 September 2025 (masih aktif hingga proses pemilihan dan penetapan pemenang dilaksanakan). Namun, jawaban tersebut tidak menjawab substansi permasalahan yang kami laporkan, yaitu Pengumuman resmi pemenang tender di aplikasi LPSE adalah PT. AWAL yang beralamat di Kota Samarinda, Sedangkan SBU yang terdaftar di aplikasi LPJK adalah atas nama PT.
Arkamaya Wangsa Ali yang beralamat di Kabupaten Mahakam Ulu.

Merujuk pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pokja Pemilihan seharusnya menggugurkan peserta yang memiliki ketidaksesuaian/inkonsistensi data identitas hukum antara dokumen penawaran (SBU) dengan sistem LPSE, kecuali terdapat dokumen hukum resmi yang membuktikan kesamaan entitas tersebut.
Meloloskan penyedia dengan identitas yang tidak sinkron berpotensi menimbulkan cacat hukum pada kontrak dan merugikan keuangan daerah.

Untuk itu, kami meminta kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selaku APIP untuk melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) guna :

- Memeriksa keabsahan ikatan kontrak dan aliran pembayaran proyek tersebut.
- Memeriksa indikasi kelalaian atau kesengajaan oleh Pokja Pemilihan dan PPK Dinas PUPR-PeraKaltim dalam meloloskan penyedia.
- Memberikan sanksi tegas berupa Daftar Hitam (Blacklist) jika ditemukan manipulasi identitas badanusaha.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan demi asas akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah, kami memohon agar Inspektorat Daerah membuka dan memberikan salinan dokumen/bukti legalitas yang menjadi dasar jawaban Inspektorat, berupa : 1. Salinan Akta Perubahan Nama Perseroan dan SK Pengesahan Kemenkumham yang membuktikan bahwa PT. Arkamaya Wangsa Ali secara hukum telah berganti nama menjadi PT. AWAL.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari kedua nama badan usaha tersebut untuk memastikan apakah keduanya memiliki nomor identitas yang sama.

Apabila dokumen pembuktian di atas tidak dapat ditunjukkan, maka secara hukum PT. AWAL dan PT. Arkamaya Wangsa Ali adalah dua entitas yang berbeda. Dengan demikian, pemenangan PT. AWAL dalam tender tersebut terindikasi cacat hukum (maladministrasi) karena memenangkan penyedia yang tidak memiliki SBU atas namanya sendiri.
Kami berharap agar dokumen pendukung tersebut dapat dibuktikan melalui jawaban selanjutnya sesuai ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik. Jika laporan kami tidak dapat dibuktikan, kami akan melanjutkan laporan ini sebagai sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur.
Demikian laporan kami sampaikan, terima kasih.

Umardin 16 Jul, 07:26

Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 :

- Pasal 7 ayat (1) huruf f : Pelanggaran asas "Adil" dan "Transparan". Pokja tidak cermat dan terkesanmemaksakan kelulusan bagi penyedia yang data legalitasnya cacat, mencederai persaingan usaha yang sehat.

- Pasal 65 : Pelanggaran segmentasi pasar. Nilai paket Rp 43,4 Miliar adalah porsi Usaha Non-Kecil(Menengah), sementara Penyedia memiliki NIB "Usaha Kecil" sehingga tidak memiliki kapasitas hukum/finansial yang sah untuk mengikat kontrak pada nilai tersebut.





Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 9 jam yang lalu

Yth. Pelapor

Terima kasih atas keberatan dan informasi tambahan yang Saudara sampaikan mengenai legalitas badan usaha pada paket Pembangunan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Bandara Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan laporan tersebut, telah dilakukan penelaahan terhadap Dokumen Pemilihan, data SPSE/SIKaP, data perizinan berusaha, dokumen administrasi badan hukum, Nomor Induk Berusaha, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Sertifikat Badan Usaha yang berkaitan dengan penyedia yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelaahan, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama badan hukum penyedia adalah PT Arkamaya Wangsa Ali, sedangkan PT AWAL merupakansingkatan dari PT Arkamaya Wangsa Ali, bukan badan hukum yang berbeda. Hubungan tersebut tercantum secara eksplisit dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024048.AH.01.02.Tahun 2022, yang di dalam Keputusan tersebut ada menyebutkan PT Arkamaya Wangsa Ali disingkat PT AWAL.
2. PT Arkamaya Wangsa Ali/PT AWAL mempunyai identitas badan usaha yang sama, yaitu: NPWP : 80.564.6[redacted]; dan NIB : [redacted].
3. Berdasarkan data LPSE/SIKaP, akun penyedia didaftarkan dengan nama tampilan PT AWAL sejaktahun 2016. Verifikasi NPWP dan data Perusahaan pada sistem menunjukkan bahwa NPWP, NIB, Akta Pendirian Perusahaan dan data perizinan badan usaha tersebut berstatus valid dan dimiliki oleh PT Arkamaya Wangsa Ali disingkat PT AWAL. Nama singkatan PT AWAL tetap muncul pada tampilan SPSE karena data profil yang digunakan sejak pendaftaran belum ada dirubah.
4. Dokumen Pemilihan mensyaratkan SBU Kualifikasi Usaha Menengah dengan Subkualifikasi BG009 dan PL003. SBU dimaksud diterbitkan atas nama lengkap badan hukum PT Arkamaya Wangsa Ali, yaitu: BG009 dengan PB-UMKU Nomor [redacted]; dan PL003 dengan PB-UMKU Nomor [redacted].
5. Pencatatan SBU atas nama PT Arkamaya Wangsa Ali dan pencatatan akun SPSE dengan namasingkatan PT AWAL tidak menunjukkan dua entitas yang berbeda karena pada data LPSE/SIKaP mempunyai NPWP, NIB, dan dasar administrasi badan hukum yang sama.
6. Dengan demikian, berdasarkan dokumen yang diperiksa, tidak ditemukan bukti bahwa SBU yangdigunakan dalam proses pemilihan merupakan milik badan usaha lain atau terjadi penggantian identitas badan usaha.
7. Perbedaan antara nama lengkap badan hukum dan nama singkatan pada tampilan sistemmerupakan ketidaksinkron administratif data profil. Untuk mencegah kesalahpahaman serupa, Inspektorat Provinsi Kaltim dan Biro PBJ Setda Provinsi Kaltim akan mendorong penyedia melakukan pemutakhiran nama profil pada SIKaP/SPSE menjadi PT Arkamaya Wangsa Ali (PT AWAL).
8. Terhadap permintaan Salinan dokumen badan hukum, NIB, atau dokumen lainnya, permohonaninformasi dapat disampaikan melalui mekanisme layanan informasi publik kepada PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemberian dokumen akan dilakukan sesuai klasifikasi informasi, perlindungan data pribadi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur mekanisme permohonan, keberatan serta penyelesaian sengketa informasi melalui saluran PPID dan Komisi Informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, substansi laporan mengenai dugaan bahwa PT AWAL dan PT Arkamaya Wangsa Ali merupakan dua badan hukum yang berbeda tidak terbukti berdasarkan dokumen administrasi badan hukum, NPWP, NIB, dan data perizinan yang tersedia.

Demikian disampaikan. Terima kasih atas partisipasi Saudara dalam pengawasan pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.